

**IMPLEMENTASI PROGRAM SISTEM INFORMASI DESA (SID) DI  
KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**Oleh : Siti Anisah**

*Sitianisah.2255@gmail.com*

**Pembimbing : Prof. Dr. H. Sujianto, M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

***Abstract***

*Forest The Village Information System Program (SID) is a village empowerment program set out in the regulations of the Regent Kuantan Singingi Regency. This program is a set of tools and processes for utilizing data and information to support resource management at the village level. The purpose of this study was to find out how the Implementation of the Village Information System Program (SID) in Singingi District, Kuantan Singingi Regency and the factors that inhibited it. The theory used is the theory of Donald Van Meter and Carl. E. Van Horn, there are six indicators that affect implementation: Policy standards and objectives; Resource; Inter-organizational communication and strengthening activities; Characteristics of implementing agents; Social, economic and political conditions; and the disposition of the implementor. This study uses a type of qualitative research with a phenomenology approach and the data needed both primary and secondary is obtained through interviewing, observation and documentation techniques for further analysis using dataanalysis techniques interactive. The results of this study indicate that: first, the Implementation of the Village Information System Program (SID) in Singingi District, Kuantan Singingi Regency is not optimal. Second, the factors that hinder the program of the Village Information System Implementation Program (SID) in Singingi District, Kuantan Singingi Regency, namely: human resources, policy resources, inter-organizational communication and activity strengthening, assessment of target groups (public opinion), economic conditions, political conditions and implementor cognition/ understanding of the implementor.*

***Keywords: Village Information System, Public Policy, Implementation, Program***

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada awal abad 21 ini telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang menuntut perubahan inovasi disetiap organisasi tidak terkecuali pada organisasi Pemerintah Desa. Pasca dikeluarkannya UU Desa No 6 Tahun 2014 pemerintah Desa diberikan hak penuh untuk mengatur tata kelola pemerintahan sendiri langsung dibawah Kemendes PDPT.

Kebijakan PP No 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN diderivasikan dalam RPJMN 2015-2019 cita ketiga yakni Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah dan Desa dalam kerangka NKRI. Kemudian diturunkan dalam Peraturan Kemenkeu RI dan Kemendes PDPT RI No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dalam bidang pemberdayaan masyarakat diantaranya dalam poin ke empat adalah pengembangan Sistem Informasi Desa.

Kebijakan Sistem Informasi Desa yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa merupakan seperangkat alat dan proses peman-faatan data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumberdaya di tingkat desa. SID merupakan sebuah sistem yang terdiri dari *software*, *hardware* dan *brainware* (pengguna). SID dikelola oleh Pemerintah Desa baik secara *offline* maupun *online* dengan tujuan meningkatkan kualitas pelaya-nan publik. Bentuk kegiatan dari program SID adalah pemasangan *wifi* di Kantor Desa, pemberian *website* dengan domain desa.id serta pelatihan aparatur desa.

Manfaat program SID yaitu memudahkan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan data desa yang akurat dan terbaru secara berkala,

serta mempermudah akses informasi serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa. Sedangkan fungsi dan muatan program SID yang tertuang dalam pasal 6 yaitu sebagai :

1. Media penyimpanan dan pengelolaan data (potensi desa, pendidikan, kesehatan, kependudukan, data kemiskinan, pembangunan desa, pembangunan kawasan pedesaan, keuangan, ekonomi, data sosial budaya, pemerintahan desa & data lain sesuai kebutuhan) yakni mengelola dan menyebar luaskan SID sesuai perundangan;
2. Media informasi dan komunikasi pemerintahan desa, yakni semua informasi desa yang dapat di akses oleh masyarakat dengan menyediakan perangkat SID; menerbitkan informasi secara berkala minimal 6 bulan sekali (informasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, laporan keuangan, dll). Serta media komunikasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat.
3. Layanan administrasi serta pengelolaan keuangan desa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Implementor program SID ini adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) dan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) dan pihak ketiga sebagai fasilitator adalah PT. Indonesia Comnets Plus (PT. ICON+) dengan Kelompok Sasarannya adalah Organisasi Pemerintah Desa dan masyarakat. Tanggung jawab DSPMD yakni bertanggung jawab dalam hal administrasi seperti mengkoordinasikan pengembangan SID, membina pengelola SID, menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), dan memberikan informasi kepada desa melalui SID. DKISP bertanggung jawab mengembangkan SID dan sistem informasi pembangunan kawasan pedesaan serta mengintegrasikan SID dengan sistem informasi yang ada di tingkat Kabupaten.

Sedangkan PT. ICON+ sebagai fasilitator yang menyediakan *wifi*, *website* domain *desa.id* serta memberikan pelatihan aparatur desa (admin dan operator desa). Sumber pendanaan program SID untuk pihak desa dianggarkan dalam APBDDes sebesar 36.000.000/tahun sedangkan yang menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kuantan Singingi.

Kabupaten Kuantan Singingi terbagi menjadi 15 kecamatan yang terdiri dari 218 Desa dan 11 kelurahan. Sejak diberlakukan kebijakan SID ada 183 desa yang telah menerapkan program SID dan 35 desa yang belum menerapkan program SID seperti terlihat dalam tabel berikut ini. Sedangkan untuk tahap pemberian *website* dengan domain “*desa.id*” oleh pihak fasilitator belum ada di realisasikan.

Tabel 1.1 Daftar desa yang telah memasang dan yang belum memasang (*wifi*) di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kecamatan	Yang telah memasang ( <i>wifi</i> )	Yang belum memasang ( <i>wifi</i> )
1.	Pucuk Rantau	9 desa	1 desa
2.	Gunung Toar	14 desa	-
3.	Singingi	12 desa	1 desa
4.	Singingi Hilir	12 desa	-
5.	Kuantan Tengah	3 desa	16 desa
6.	Kuantan Mudik	23 desa	1 desa
7.	Kuantan Hilir	11 desa	3 desa
8.	Hulu Kuantan	11 desa	1 desa
9.	Cerenti	5 desa	6 desa
10.	Benai	14 desa	1 desa
11.	Sentajo Raya	13 desa	1 desa
12.	Kuantan Hilir Seberang	12 desa	2 desa
13.	Logas Tanah Darat	15 desa	-
14.	Inuman	12 desa	2 desa
15.	Pangean	17 desa	-
<b>Total klasifikasi</b>		<b>183 desa</b>	<b>35 desa</b>
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>218 desa</b>	

Sumber: Data Olahan Peneliti 2018

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa Kecamatan Singingi merupakan kecamatan yang yang 12 desanya telah menerapkan program SID dan memiliki 1 desa ex-transmigrasi yang telah memiliki *website* desa yaitu desa Sungai Bawang dengan link [www.sungaibawang.com](http://www.sungaibawang.com) bahkan sebelum masuk program SID yang dibuat oleh pemuda desa setempat. Dan hanya ada 1 desa

asli yang belum menerapkan program SID yaitu desa Pangkalan Indarung.

Adapun realisasi program SID yang ada dilapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sungai Bawang belum menjalankan sepenuhnya program SID seperti terlihat dalam fenomena berikut ini:

1. Tidak semua desa menerapkan program SID. Hanya ada 183 desa dari 218 desa yang menerapkan program ini dan 35 desa tidak menerapkan. Padahal dalam Perbup No. 59 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa Pasal 15 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa telah menerapkan SID paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tahun 2017. Dan tidak semua desa yang menerapkan program SID memiliki *website*. Hanya ada 8 desa yang memiliki *website* dari 183 desa yang menerapkan program SID meskipun dengan domain yang berbeda.
  2. Proses penyimpanan dan penge-lolaan data, tidak semua data terdapat dalam website “Sungaibawang.com”. Dalam *website* tersebut hanya memuat profil desa, pemerintahan desa, data kependudukan desa, berita desa, produk desa, dan peraturan desa dari yang seharusnya data data lain sesuai pasal 6 juga harus ada dalam *website* tersebut.
  3. Publikasi *website* Sungai Bawang belum memuat semua indikator yang terdapat dalam Pasal 11. Dalam website tersebut kabar desa telah diperbarui hingga tahun 2018 meskipun sementara kewajiban Pemerintah Desa yang lainnya belum dijalankan.
  4. Interaksi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat/ sebaliknya belum berjalan melalui *website* Desa Sungai Bawang karena dalam *website* tersebut belum memiliki fitur layanan komunikasi.
  5. Layanan administrasi masih menggunakan cara konvensional dan belum bisa dilakukan melalui *website* Desa Sungai Bawang.
- Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan

judul “Implementasi Program Sistem Informasi Desa (SID) di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”.

### 1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program Sistem Informasi Desa (SID) di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat implementasi program Sistem Informasi Desa (SID) di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Sistem Informasi Desa (SID) di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Implementasi Program Sistem Informasi Desa (SID) di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

### 1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis, sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran peneliti kepada pihak lain yang akan meneliti dengan permasalahan yang sama terutama di program studi Administrasi Publik.
2. Manfaat Praktis, sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sehubungan dengan implementasi program Sistem Informasi Desa (SID).

## 2. KONSEP TEORI

### 2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut **Friedrich** dalam **Agustino (2014:7)** adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam

suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Secara sederhana **Nugroho (2012:123)** mengemukakan pendapatnya bahwa kebijakan publik merupakan setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara.

Adapun **Mulyadi (2016:1)** mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan salah satu dimensi pokok dalam ilmu dan praktik administrasi publik, kebijakan publik dianalogikan fungsinya sama dengan otak pada tubuh manusia, karena melalui instrumen ini, segala aktivitas kehidupan bernegara & bermasyarakat mulai dilakukan oleh birokrasi, pihak swasta dan masyarakat.

### 2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. **Van Meter** dan **Van Horn** dalam **Mulyadi (2016:57)** merumuskan implementasi kebijakan publik sebagai: “tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang di arahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional.

Proses pengimplementasian kebijakan publik terdapat dua langkah (**Nugroho, 2017:728**) yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan kebijakan tersebut. Implementasi menurut **Van Meter** dan **Van Horn** dalam **Mulyadi (2016:72)** mengatakan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Variabel yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu:

1. Standar dan tujuan kebijakan, standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi

- yang bisa menyebabkan terjadinya konflik diantara para agen implementasi.
2. Sumberdaya kebijakan, kebijakan perlu di dukung oleh sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
  3. Aktivitas pengamatan & komunikasi interorganisasional, dalam mengimplementasikan program perlu di dukung dan di koordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang di inginkan.
  4. Karakteristik pelaksana, sejauhmana kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan.
  5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik; (sumberdaya ekonomi lingkungan) yang dapat mendukung keberhasilan implemetansi kebijakan.
  6. Disposisi/sikap pelaksana, disposisi implementor mencakup 3 hal:
    - Respons implemetor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
    - Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan.
    - Intensitas disposisi imple-mentor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut **Sujianto (2008:55)** yakni:

1. Komunikasi, tidak hanya hubungan antara pembuat kebijakan/program dengan pelaksana kebijakan, tetapi yang terpenting adalah hubungan antara pelaksana program dengan kelompok sasaran program yang dilaksanakan melalui komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal.
2. Sumberdaya, baik sumberdaya manusia/pelaksana, dukungan fasilitas, & sumberdaya wewenang.

3. Disposisi, sikap pelaksana untuk mau atau niat untuk menerima atau menolak, atau memotivasi para pelaksana untuk melaksanakan suatu program.
4. Manfaat kebijakan, kebijakan/ program yang dirasakan oleh kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan, mempunyai manfaat untuk jangka pendek dan berkesinambungan, maka akan mendapat dukungan yang besar dari kelompok sasaran.

### 2.3 Program

Program menurut **Sujianto (2008:28)** adalah suatu kompleksitas dari tujuan, kebijakan, prosedur, peraturan, pemberina tugas dan langkah yang harus diambil, sumber yang harus dimanfaatkan dan elemen lain yang diperlukan untuk melaksanakan arah tindakan tertentu. Dalam menggam-barkan dan program terdapat bagian pokok yang harus ada yaitu: input, komponen, implementasi kerja dilapangan, bentuk berhubungan antar lini, outcomes, **Afrizal** dalam **Wirawan (2012:26)**

1. Input, adalah sumber yang di butuhkan untuk menjalankan program (dana, sumberdaya manusia, sarana, fasilitas pendu-kung, pengetahuan, dll)
2. Komponen, kelompok aktif dalam lapangan.
3. Implementasi kerja/ pelaksanaan, contoh modal untuk menilai kebutuhan pelatihan peserta, skill departement untuk menyediakan tenaga-tenaga terampil.
4. Bentuk-bentuk hubungan antar lini, maksudnya adalah inventarisir faktor apa saja yang bisa menjembatani antara output dari suatu program dengan outcomes.
5. Outcomes, sebanyak mungkin output program diterima masyarakat disemua sektor.

### 2.4 Inovasi Pelayanan

Inovasi menurut **Suwarno (2008)**, adalah salah satu jalan atau bahkan breakthrough untuk mengatasi kemacetan dan kebuntuan organisasi di sektor publik. Sedangkan inovasi menurut **Siagian (2008:45)**

merupakan salah satu produk dan kreativitas. Menurut **Taufik (2000:5)** faktor penyebab (sumber) inovasi antara lain:

1. Perkembangan/kemajuan teknologi
2. Perubahan kebutuhan/keinginan atau selera konsumen
3. Perubahan dalam segmen pasar atau kemunculan segmen pasar baru
4. Tekanan persaingan semakin ketat
5. Perubahan atas faktor produksi (kelangkaan relatif) dan faktor ekonomi tertentu (misalnya nilai tukar mata uang).

### 2.5 E-Government

*E-govemment* menurut **Prasojo, et.al (2007:82)** didefinisikan sebagai seluruh tindakan dalam sektor publik yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mengoptimalkan proses pelayanan publik yang efisien, transparan dan efektif, telah menjadi bagian penting dalam usaha untuk membangun tata pemerintahan yang baik di Indonesia. Ada tiga cara dalam mengklasifikasikan *e-government* menurut **Cahyana (2004:4)**:

1. Proses otomatisasi, yakni mengubah peran manusia dalam menjalankan proses yang meliputi menerima, menyimpan, *processing*, output dan mengirimkan informasi.
2. Proses informasi, yakni mendukung peran manusia dalam menjalankan proses informasi, misalnya mendukung arus proses pengambilan keputusan, komunikasi dan kualitas pelayanan.
3. Proses transformasi, yakni membuat ICT baru. Untuk menjalankan proses informasi/mendukung proses informasi, misal membuat metode baru dalam pelayanan publik.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif pendekatan fenomenologi.

### 1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD), Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (DKISP), PT. Indonesia Connets Plus (ICON+), Desa Sungai Bawang serta Desa Pangkalan Indarung. Alasan penulis mengambil Desa Sungai Bawang karena desa ini adalah desa ex-transmigrasi yang terletak di Kecamatan Singingi dan telah menerapkan program SID serta telah memiliki *website* “Sungaiawang.com” sedangkan Desa Pangkalan Indarung merupakan desa lokal yang berada di Kecamatan Singingi yang belum menerapkan program SID.

### 3.3 Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dengan mewawancarai informan yang dianggap mengetahui masalah penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala DSPMD Kabupaten Kuantan Singingi
2. Seksi Keuangan dan Aset Desa DSPMD Kabupaten Kuantan Singingi
3. Seksi Media Informasi DKISP Kabupaten Kuantan Singingi
4. Bidang Pemasaran PT. ICON+ Pekanbaru
5. Kasi Pemerintahan Desa Sungai Bawang
6. Kepala Desa Pangkalan Indarung.

### 3.4 Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi dengan informan dan pihak lain melalui wawancara serta pengamatan langsung, terkait implementasi program Sistem Informasi Desa (SID) di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung berupa data Visi Misi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2020, Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 57 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa, SOP Sistem Informasi Desa, Profil DSPMD, Profil DKISP, Profil Desa Sungai Bawang dan Profil Desa Pangkalan Indarung.

## **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada periode bulan April 2018 sampai dengan Februari 2019. Penelitian ini dilakukan secara bertahap, terdiri dari:

### **a. Observasi (Pengamatan)**

Observasi ini penulis lakukan dalam upaya menggali informasi tentang implementasi program SID di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Observasi dilaksanakan dari tanggal 12 April 2018 sampai 14 Februari 2019.

### **b. Interview (Wawancara)**

Penulis melakukan wawancara langsung secara mendalam terhadap informan yang mengetahui tentang implementasi program SID di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil wawancara berbeda tersebut di analisis secara mendalam setelah itu direkap menjadi hasil analisis dan di dukung dengan hasil survey yang ditemukan di lapangan. Wawancara dilakukan dari tanggal 12 April 2018 sampai 14 Februari 2019 dengan merekam mencatat informasi yang didapat.

### **c. Dokumentasi**

Penulis mengambil data yang bersumber dari dokumen yang didapat dari informan yang ada hubungannya dengan implementasi program SID di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi berupa file, foto, buku profil, laporan akhir dan

sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini penulis peroleh dari dokumen pribadi yang diberikan oleh instansi dan pihak yang terkait didalam penelitian ini. Dokumentasi dilakukan dari 12 April 2018 sampai 14 Februari 2019.

## **3.6 Analisa Data**

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data *interactive* dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, digambarkan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara mendalam kepada informan dan dilanjutkan dengan langkah dokumentasi yaitu dengan meminta dokumen terkait program SID kepada DSPMD, DKISP, Desa Sungai Bawang, Desa Pangkalan Indarung dan PT.ICON+.
2. Mereduksi data dengan memfokuskan implementasi program SID pada DSPMD, DKISP, PT.ICON+, Pemdes Sungai Bawang dan Pemdes Pangkalan Indarung.
3. Menyajikan data terkait implementasi program SID menggunakan teks naratif. Dan selanjutnya mencari faktor yang penghambat tidak terwujudnya implementasi program SID yang optimal untuk dianalisis kemudian dikategorikan dan disajikan dalam bentuk gambar.
4. Menyimpulkan setelah menemukan faktor penghambat implementasi program SID.

## **4. HASIL PENELITIAN**

### **4.1 Implementasi Program Sistem Informasi Desa (SID) di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi**

#### **4.1.1 Standar dan Sasaran Kebijakan**

##### **a. Standar Kebijakan**

Standar kebijakan harus jelas dan terukur sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menimbulkan konflik diantara para agen implementor. Adapun standar program SID ini adalah Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi No. 57 Tahun 2017 tentang Sistem

Informasi Desa dan Standar Operasional Prosedur (SOP) program Sistem Informasi Desa. Dalam menerapkan program SID prosedur yang harus dilalui sesuai dengan SOP Sistem Informasi Desa yang tertuang dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi No. 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa. Adapun standar yang dijadikan patokan program SID dilapangan adalah Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi No. 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa dan Standar Operasional Prosedur (SOP) program Sistem Informasi Desa.

### **b. Sasaran Kebijakan**

Sasaran kebijakan merupakan kelompok sasaran / target kebijakan program SID. Adapun sasaran kebijakan dalam program SID berdasarkan Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa (SID) adalah ini adalah pemerintah desa dan masyarakat. Jika ditinjau dari segi kelompok sasaran, program SID dinilai belum tepat sasaran hal ini dikarenakan tidak semua Pemerintah Desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi menerapkan program SID. Hanya ada 183 dari 218 desa yang telah menerapkan program SID, sementara 35 desa lainnya belum menerapkan.

#### **4.1.2 Sumberdaya**

##### **a. Sumberdaya Manusia**

Sumberdaya manusia merupakan faktor penting dalam merealisasikan suatu kebijakan. Manusia merupakan subjek penggerak dalam menjalankan suatu kebijakan dalam hal ini kebijakan tentang program SID. Jika ditinjau dari segi sumberdaya manusia program SID dilapangan, sumber daya manusia di Desa Sungai Bawang masih belum memadai baik dari segi kualitas maupun segi kuantitasnya. Karena untuk sementara yang memegang

menjadi admin dan operator desa adalah Kasi Pemerintahan sehingga akan menambah beban kerja baru yang dinilai kurang efektif.

##### **b. Sumberdaya Materil**

Sumberdaya materil merupakan faktor pendukung dalam mengimplementasikan sebuah program SID. Terkait sumberdaya materil DSPMD memiliki keterbatasan sumberdaya materi seperti sarana prasarana komputer dan jaringan *Fiber Optik* di kantor dinas, sama halnya dengan yang terjadi di Desa Sungai Bawang pemerintah desa kekurangan komputer dan alat pendukung lainnya.

##### **c. Sumberdaya Waktu**

Kebijakan yang ideal adalah kebijakan yang dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Perealisasian program SID mengalami keterlambatan atau tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Padahal dalam Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2017 Pasal 15 dijelaskan bahwa paling lama satu tahun setelah peraturan tersebut disahkan semua desa yang ada di Kuantan Singingi harus menerapkan program SID.

##### **d. Sumberdaya Kebijakan**

Sumberdaya kebijakan harus tersedia dalam rangka memperlancar administrasi dalam mengimplementasikan program SID. Ditinjau dari sumberdaya kebijakan Implementor tidak mengupdate kebijakan, program SID hanya berpatokan pada Peraturan Bupati No.57 tahun 2017 dan Standar Operasional Prosedur SID sementara untuk kebijakan turunannya sendiri tidak ada baik itu bentuk proyek / kegiatan dari kebijakan SID itu sendiri.

#### **5.1.3 Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas**

Komunikasi dalam suatu organisasi sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam penyampaian informasi antar anggota dalam

suatu organisasi dan agar tujuan tercapai. Komunikasi yang dijalankan implementor kurang intens dimana tidak ada rapat koordinasi lanjutan membahas perkembangan program SID. Kelompok sasaran dalam hal ini Pemerintah Desa Sungai Bawang juga mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan pihak ketiga (ICON+).

#### **5.1.4 Karakteristik Agen Pelaksana**

##### **a. Karakteristik Implementor**

Sejauh mana kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi program SID. Implementor (DSPMD dan DKISP) komitmen akan menjalankan program SID, namun bentuk komitmen DSPMD sampai saat ini belum bisa dibuktikan secara nyata, hal ini terlihat dimana sejak disahkannya Peraturan Bupati tahun 2017 sampai sekarang sudah 2 tahun berjalan program ini belum ada perkembangan.

##### **b. Penilaian Kelompok Sasaran (Opini Publik)**

Bagaimana kelompok sasaran mendukung/ menolak program SID. Kelompok sasaran dalam hal ini Pemerintah Desa Sungai Bawang sangat menyayangkan dengan tindakan ICON+ yang tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban yang seharusnya diberikan kepada desa.

#### **5.1.5 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik**

##### **a. Kondisi Sosial**

Kondisi sosial merupakan dampak sosial dari kebijakan SID dilingkungan setempat. Dampak sosial yang ditimbulkan program SID tidak terlalu signifikan. Hal ini dikarenakan yang mengetahui keberadaan *wifi* desa mayoritas remaja sehingga banyak dari mereka yang memanfaatkan *wifi* sesuai kebutuhan mereka. Sedangkan untuk masyarakat secara umum belum mengetahui

sepenuhnya.

##### **b. Kondisi Ekonomi**

Ekonomi merupakan faktor terpenting dalam menjalankan program SID. pendanaan program SID. Mereka tidak memiliki kendala berarti karena memiliki sumber pendanaan yang jelas yaitu Dana Desa. Namun mereka mengecewakan terhadap sikap pihak ketiga dalam hal ini ICON+ yang kurang bertanggung jawab.

##### **c. Kondisi Politik**

Kondisi politik merupakan faktor pendukung implementasi program SID. Apakah kebijakan tersebut dibuat karena pengaruh kekuasaan elite politik/dibuat karena ada kelompok kepentingan tertentu. Ditinjau dari segi politik, penunjukan PT.ICON+ masih menuai pro kontra baik itu di lingkungan implementor (DSPMD) maupun di lingkungan kelompok sasaran.

#### **5.1.6 Disposisi Implementor**

##### **a. Respon implementor terhadap kebijakan**

Respon yang diberikan implementor terhadap keijakan program SID yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. implementor menginginkan program SID terlaksana namun tidak diimbangi dengan kesiapan implementor dalam mempersiapkan segala sumberdaya yang dibutuhkan.

##### **b. Kognisi Implementor**

Kognisi merupakan pemahaman implementor terhadap program SID. Ditinjau dari segi pemahaman implementor dalam hal ini Pengakuan bapak Aset Keuangan dan Desa tidak sejalan dengan pernyataan Kepala DSPMD bahwa ICON+ ini sebagai pihak fasilitator yang disarankan Pemerintah Kabupaten dengan alasan karena mereka sudah memiliki jaringan di Kuansing dibawah PLN. Dan bapak Seksi Keuangan dan Aset Desa tidak mengetahui

kewajiban dari ICON+ selain menyediakan jaringan juga menyediakan *website*.

### **c. Intensitas disposisi implementor**

Preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Jika ditinjau segi intensitas sikap implementor dalam program SID tindakan implementor dalam menjalankan program ini tidak serius. Hal ini dikarenakan implementor tidak ada mengagendakan rapat lanjutan membahas agenda kegiatan program SID agar tujuan dari program tersebut bisa tercapai.

## **5.2 Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Program Sistem Informasi Desa di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi**

### **a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting sebagai penggerak dalam menjalankan program SID. Terkait dengan sumberdaya manusia DSPMD belum mencukupi begitu juga dengan sumber daya manusia Pemerintah Desa Sungai Bawang yang terbatas yang saat ini *website* desa dipegang oleh Kasi Pemerintahan yang merangkap jabatan karna tidak adanya admini dan operator desa. Selain itu dilihat dari kualitas sumber daya manusia Pemerintah Desa Sungai Bawang juga belum memadai. Dimana hanya ada dua aparatur desa yang memahami teknologi informasi.

### **b. Sumberdaya Kebijakan**

Sumberdaya kebijakan juga harus tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi dalam mengimplementasikan program SID. Ditinjau dai segi sumberdaya kebijakan implementor tidak mengupdate kebijakan Sistem Informasi Desa, dalam perealisasi program Sistem Informasi Desa hanya berpatokan pada Peraturan Bupati No.57 tahun 2017 dan Standar Operasional

Prosedur (SOP) Sistem Informasi Desa sementara untuk kebijakan turunannya sendiri tidak ada baik itu bentuk proyek maupun kegiatan dari kebijakan Sistem Informasi Desa itu sendiri. Hal ini terlihat dimana dalam perelisasiannya pihak implementor dalam hal ini DSPMD tidak menganggarkan kedalam APBD tahun 2018 /2019 dan hanya menjalankan sambil berlalu dan tidak memiliki target capaian.

### **c. Komunikasi dan Koordinasi**

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam mengimplementasikan program SID. Tanpa adanya komunikasi yang baik maka tujuan program tersebut tidak akan tercapai. komunikasi yang dijalankan oleh implementor baik itu DSPMD, DKISP dan ICON+ tidak terstruktur, hal ini disebabkan karena program ini tidak memiliki kegiatan turunan sehingga dalam melakukan komunikasi hanya seadanya dan koordinasi yang dilakukan tidak jelas sehingga tidak satu komando yang menyebabkan tumpang tindih informasi.

Pemerintah Desa Sungai Bawang juga mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan pihak ICON+ dimana ketika mereka mengadu terkait permasalahan jaringan yang terpasang di kantor desa pihak ICON+ tidak merespon langsung keluhan kelompok sasaran bahkan sampai sekarang permasalahan tersebut tak kunjung diselesaikan sehingga menimbulkan kekecewaan terhadap kelompok sasaran.

### **5.2.4 Penilaian Kelompok Sasaran (Opini Publik)**

Penilaian kelompok sasaran merupakan bagaimana kelompok sasaran mendukung atau menolak suatu kebijakan kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan terhadap program SID. Ditinjau dari segi penilaian kelompok sasaran bahwa mereka sangat menyayangkan tindakan ICON+ yang tidak bertanggung jawab yang tidak hanya dirasakan oleh Pemerintah Desa Sungai Bawang

saja bahkan hampir semua Desa yang tergabung dalam forum desa Se-Kecamatan Singingi sangat kecewa dan ingin memutuskan kontrak dengan pihak ICON+.

Perealisasi program SID banyak terdapat pro kontra dari pihak kelompok sasaran maupun dari masyarakat setempat dikarenakan beberapa alasan diantaranya pihak Pemerintah Desa Sungai Bawang sangat kecewa karena hak yang seharusnya mereka dapatkan dari pihak fasilitator tidak juga diterima sehingga perlu dilakukan evaluasi kontrak kerja antara Pemerintah Desa dengan pihak ketiga, selain itu program ini dinilai menguntungkan pihak tertentu sehingga perlu dilakukan pengkajian ulang apakah program ini dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

### 5.2.5 Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi sangat mempengaruhi implementasi program SID. Hal ini dikarenakan ekonomi merupakan faktor terpenting dalam menjalankan suatu kebijakan. Jika ekonominya bermasalah otomatis tujuan kebijakan tersebut tidak akan tercapai. Jika ditinjau dari segi ekonomi program SID ini tidak ada dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kuantan Singingi baik itu tahun 2018 maupun tahun 2019. Tentunya dengan tidak dianggarkannya program SID ini berakibat pada tidak berjalannya program karena tidak ada biaya operasionalnya padahal program ini sudah berjalan selama hampir 2 tahun. Terlebih apabila ada masalah di lapangan mereka tidak akan bisa memantau secara langsung apabila pihak Pemerintah Desa tidak melaporkan.

Sedangkan Pemerintah Desa Sungai Bawang mengecewakan sikap ICON+ karena selain pembiayaan yang mahal pelayanan yang diberikan jauh dari apa yang seharusnya didapatkan terlebih kualitas jaringan yang diterima sangat buruk. Dana desa yang seharusnya bisa di manfaatkan untuk

program yang lebih bermanfaat harus terbuang sia-sia.

### 5.2.6 Kondisi Politik

Kondisi politik merupakan faktor pendukung implementasi program SID. Apakah program tersebut dibuat karena pengaruh kekuasaan elite politik. Ditinjau dari segi politik program SID merupakan program Bupati Kuantan Singingi terdapat unsur permainan politik dimana kelompok kepentingan telah mengatur strategi agar program SID bisa diterima oleh pemerintah Desa dan juga telah dibuat strategi agar PT.ICON+ ini terpilih sebagai pihak ketiga sebagai fasilitator program SID. Hal ini terlihat dimana pada awalnya ketika Pemerintah Desa ditawari program SID forum Kepala Desa se Kabupaten Kuantan Singingi menolak program SID namun ada oknum yang diam-diam mendatangi pemerintah daerah dan menyetujui program SID.

### 5.2.7 Kognisi Implementor

Kognisi merupakan pemahaman implementor terhadap program SID. Terkait dengan pemahaman implementor dalam program SID ini ungkapan Seksi Keuangan Aset dan Desa tidak sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Kepala DSPMD dan apa yang diungkapkan oleh Seksi Media Informasi DKISP. Padahal dalam Preraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Sistem Informasi Desa dijelaskan bahwa SID merupakan program Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang berada dibawah tanggung jawab DSPMD dan DKISP bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai fasilitator yakni PT. ICON+. Seksi Aset dan Desa tidak memahami kedudukannya dalam program SID.

Selain itu Pernyataan lain juga berbeda Seksi Kuangan dan Aset Desa bahwa menyatakan bahwa untuk janji pemberian *website* dari ICON+ itu tidak ada. Padahal dalam kerja samajelas bahwa selain memberikan *wifi* ICON+ juga berkewajiban memberikan *website*

dan pelatihan kepada pegawai desa.

## 6. PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi program Sistem Informasi Desa (SID) masih belum optimal. Ditinjau dari:
  - a. Indikator standar dan sasaran kebijakan, belum terealisasi sepenuhnya karena masih ada desa di Kuantan Singingi yang belum menerapkan program SID.
  - b. Sumberdaya yang belum memadai diantaranya keterbatasan dan ketidaksiapan sumberdaya manusia serta sumberdaya kebijakan yang tidak di upgrade sehingga program tersebut jalan ditempat.
  - c. Komunikasi dan koordinasi implementor kurang intens, dimana tidak ada rapat koordinasi lanjutan antara implementor, kelompok sasaran dan pihak ketiga membahas program SID.
  - d. Karakteristik agen pelaksana, ungkapan komitmen implementor tidak dibuktikan dengan bukti konkrit. Karena program SID ini tidak ada di agendakan baik dalam APBD maupun dalam agenda dinas pada tahun 2018/2019.
  - e. Penilaian kelompok sasaran terhadap program SID, kelompok sasaran sangat kecewa terhadap sikap ICON+ yang tidak responsif terhadap permasalahan dilapangan.
  - f. Kondisi sosial, ekonomi dan politik, kelompok sasaran merasa pembiayaan program SID ini terlalu mahal namun pelayanan yang diterima dari ICON+ tidak sepadan. Begitu juga dari segi

politik, program SID ini didominasi oleh kepentingan politik dimana pemilihan pihak ketiga ini masih menuai pro kontra oleh publik sehingga berdampak menimbulkan masalah baru.

- g. Disposisi implementor yakni respon implementor, kognisi dan intensitas disposisi implementor, dimana pemahaman salah satu implementor berbeda sehingga menimbulkan tumpang tindih tupoksi kerja dalam menjalankan program SID.
2. Faktor-faktor penghambat implementasi program SID di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi adalah Sumber Daya Manusia, Sumberdaya Kebijakan, Komunikasi dan Koordinasi, Penilaian Kelompok Sasaran (Opini Publik), Kondisi Ekonomi, Kondisi Politik dan Kognisi Implementor.

### 6.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, penulis memberikan saran atau masukan-masukan sebagai berikut:

1. Implementor (DSPMD dan DKISP) serta pihak fasilitator (PT.ICON+) diharapkan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kelompok sasaran (Pemerintah Desa) agar sumberdaya yang dibutuhkan memadai, mengupgrade kebijakan SID, mengagen-dakannya dalam APBD melalui kebijakan turunan dalam bentuk proyek dan kegiatan agar tujuan kebijakan tersebut tercapai serta meningkatkan pemahamannya terkait program SID agar tidak tumpang tindih dalam menjalankan tupoksi kerja masing-masing implementor. Implementor, pihak ketiga dan kelompok sasaran diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan melakukan komunikasi terarah agar tidak terjadi tumpang tindih informasi ataupun miss komunikasi serta agar satu komando.
2. Pihak fasilitator dalam hal ini PT.ICON+

diharapkan lebih responsif menanggapi masalah kelompok sasaran di lapangan agar kelompok sasaran tidak merasa dirugikan serta melakukan transparansi dalam pengelolaan anggaran program SID kepada kelompok sasaran demi terciptanya kepercayaan publik dan memperoleh feed back bagi kedua belah pihak serta mengevaluasi kontrak kerja kesepakatan kontrak program SID yang ada serta adanya Kebijakan Program Sistem Informasi Desa ini diharapkan tidak menjadi media politik bagi kelompok kepentingan tertentu sebagai lahan untuk mengambil keuntungan pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika
- Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Akadun. 2009. Teknologi Informasi Administrasi. Bandung: Alfabeta
- Azhari dan idham. 2002. Good Governance dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: UGM
- Cahyana, Ahmadjayadi. 2004. Sistem Informasi Kepemerintahan Abad ke 21. Jakarta: Kominfo
- Ellitan, Lina dan Lina, Ananta. 2008. Manajemen Strategi Operasi Teori dan Riset di Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Indrajit, R.E.O. 2006. Elektronik government strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. Beberapa pemikiran penerapan E-Government dalam pemerintahan Daerah di Indonesia. Yogyakarta: seminar FMIPA-UGM
- Jones, Charles. P., 2012. Investment Analysis and Management, John Willey & Sons, Inc., Edisi kesebelas: New York.
- Kadarini, Sri, Ria Dina. 2011. Rencana Kerja Peningkatan Kinerja Penyuluhan Keluarga Berencana dalam Partisipasi di UPTD Pemberdayaan Sukajadi di BPPMKB Kota Pekanbaru. Skripsi. Pekanbaru: Unri.
- Lester, James P, Stewart, Joseph. 2000. Public Policy An Evoluntary Approach, Wadsworth, Stamford, USA.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset,
- Mulyadi, Deddy. 2016. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta
- Nasution. (2003). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito
- Nawawi, Hadari. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugroho, Riant. 2012. Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant. 2017. Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Pasolong, Harbani. 2016. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Prasojo, Eko. 2007. Reformasi Birokrasi dan Good Governance, Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Departemen Ilmu Administrasi FISIP, Universitas Indonesia.
- Siagian, S.P. 2008. Manajemen Stratejik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Solichin, Abdul Wahab. 2008. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sujianto. 2008. Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik. Pekanbaru: Alaf Riau
- Taufik, Tatang. 2000. Pengembangan Sistem Inovasi Daerah Perspektif Kebijakan,

- Pusat Pengkajian  
Kebijakan Pengembangan Unggulan  
Daerah dan Peningkatan Kapasitas  
Masyarakat. Jakarta: BPPT.
- Wirawan. 2012. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi & Profesi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yusuf, A. Muri, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup
- Jurnal:**
- Arita, Triyani Fitri1, Torkis Nasution2, Herwin. 2015. Pengembangan Model Pelayanan Kantor Desa terhadap Masyarakat Berbasis Mobile Computing. *Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika (JEPIN)* Vol. 1, No. 2.
- Daryono. 2013. Pengembangan Inovasi Administrasi Pemerintah Desa Model e-Government Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Universitas Jenderal Soedirman*.
- Djunaedi. 2005. E-Government dalam Bingkai Reformasi Administrasi Publik Menuju Good Governance. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* Vol 9, No 1 Mei Hlm. 55-57.
- Hidayatulloh, Syarif. Ciske, Mulyadi. 2015. Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Canggih Berbasis Web. *Jurnal IT CIDA* Vol 1 No. 1 Desember 2015 54 ISSN: 2477-8133 e-ISSN: 2477-8125
- Noviyanto, Fiftin. Tedy Setiadi, Iis Wahyuning-Sih. 2014. Implementasi Sikades (Sistem Informasi Kependudukan Desa) untuk Kemudahan Layanan Administrasi Desa Berbasis Web Mobile. *Jurnal Informatika* Vol. 8, No. 1, Januari 2014
- Sulismadi, Wahyudi, Muslimin. 2016. Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis e-Government Pembangunan Desa Berdaya Saing. Ringkasan Hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) Tahun Ke 1 (2016) dari Rencana Tiga Tahun
- Internet:**
- Badan Pusat Statistik. 2016, Kuantan Singingi dalam Kependudukan: BPS (Diakses 20 Maret 2019, 20:00)
- Edi Sunarto. 2017. Dari Awal, Forum Kepala Desa Kuansing Tolak Program Internet Desa PT Icon Plus dalam <http://www.halloriau.com/read-kuansing-109364-2019-01-02-dari-awal-forum-kepala-desa-kuansing-tolak-program-internet-desa-pt-icon-plus.html> (Diakses Kamis, 03/01/2019, 15:00).
- Pedri. 2017. Biaya Besar Program Internet Masuk Desa di Kuansing ditentang dalam <https://senuju.com/news/detail/7659-biaya-besar-program-internet-masuk-desa-di-kuansing-ditentang.html> (diakses 5 Mei 2019, 13:00)
- Suandri. 2018. "Aparatur Desa dan Masyarakat Keluhkan Koneksi Internet Icon Plus Lelet" dalam <https://www.riaumandiri.co/news/detail/55286/aparatur-desa-dan-masyarakat-keluhkan-koneksi-internet-icon-plus-lelet.html> (diakses 05/05/2019, 14:50)
- Dokumen:**
- UU RI No 6 Tahun 2014 Tentang Desa;  
RPJMN 2015-2019;  
PP No 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa;  
Aturan Kemenkeu RI dan KemenDes PDPT No. 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;  
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.  
Visi Misi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2020  
Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 57 Tahun 2017 Tentang Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi;  
SOP Sistem Informasi Desa Kabupaten Kuantan Singingi.